

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 187 HURUF C KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS

JOJON TARJONO
NIM. 82338220023

Adanya penolakan pelaksanaan outopsi mayat/bedah mayat oleh pihak keluarga sehingga menghambat proses penyidikan tindak pidana pembunuhan namun pada Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP menegaskan bahwa outopsi/bedah mayat oleh Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter atau ahli lainnya sangat diperlukan untuk pembuktian bedah mayat dan hasil pemeriksaannya dibuat dalam bentuk surat berupa *Visum Et Repertum*. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana peranan *Visum Et Repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan teori hukum yang dihubungkan pada studi kasus penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama. Visum Et Repertum* merupakan alat bukti surat dan/atau keterangan ahli guna pembuktian secara medis tentang sebab-sebab kematian tidak wajar (*Unnatural Death*), sehingga memiliki peranan penting dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis sebagaimana dijelaskan pada Pasal 187 Huruf (c) KUHAP. *Kedua*. Salah satu hambatan pengungkapan tindak pidana pembunuhan adalah keberatan penolakan outopsi/bedah mayat dari pihak keluarga. Dikarenakan pada Pasal 134 Ayat (1) KUHAP menghendaki Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak keluarga korban. *Ketiga* Upaya yang dilakukan penyidik adalah memberikan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut akan tetapi demi kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana maka penyidik tetap melakukan outopsi/bedah mayat dan bahkan dapat menerapkan Pasal 216 Ayat (1) Juncto Pasal 222 KUHP karena tidak patuh terhadap perintah Penyidik serta menghalang-halangi penyelesaian perkara pidana.

**Kata Kunci; *Visum Et Repertum*, Tindak Pidana Pembunuhan;
Outopsi/Bedah Mayat**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF VISUM ET REPERTUM IN INVESTIGATIONS OF MURDER CRIMES IN CONNECTION WITH ARTICLE 187 LETTER C OF THE CRIMINAL PROCEDURE LAW IN THE JURISDICTION OF THE CIAMIS POLICE

JOJON TARJONO
NIM. 82338220023

There is a refusal to carry out an autopsy/post-mortem by the family, thereby hampering the process of investigating the criminal act of murder, but Article 133 and Article 134 of the Criminal Procedure Code emphasizes that an autopsy/post-mortem by a Judicial Medical Expert or doctor or other expert is very necessary to prove the post-mortem and the results of the examination. made in the form of a letter in the form of a Visum Et Repertum. The problem formulation is how the role of Visum Et Repertum in the investigation of criminal acts of murder is related to Article 187 Letter c of the Criminal Procedure Code as well as the obstacles and efforts made by investigators to overcome these obstacles.

The research method uses a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal principles and legal theory which are related to case studies investigating criminal acts of murder in the Ciamis Region

Based on the research results, it can be concluded that First. Visum Et Repertum is a form of documentary evidence and/or expert testimony for medical proof of the causes of unnatural death, so it has an important role in uncovering criminal acts of murder in the Ciamis Police Legal Area as explained in Article 187 Letter (c) Criminal Procedure Code. Second. One of the obstacles to disclosing a crime of murder is the family's objection to refusing an autopsy/post-mortem. This is because Article 134 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code requires investigators to notify the victim's family first. Third, the efforts made by investigators are to provide as clearly as possible the aims and objectives of the need for this surgery, but for the sake of legal certainty in the criminal justice system, investigators continue to carry out autopsies/post-mortems and can even apply Article 216 Paragraph (1) in conjunction with Article 222 of the Criminal Code because disobeying investigators' orders and obstructing the resolution of criminal cases.

Keywords; Visum Et Repertum, Crime of Murder; Autopsy/Post-mortem